

ARTIKEL
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) TERHADAP
PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DI KELURAHAN
HUSEIN SASTRANEGARA KECAMATAN CICENDO KOTA
BANDUNG

GANJAR ARIMUKTI

NPM: 1880.100.30



PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2021

ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung” dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang PIPPK, masih lemahnya struktur birokrasi, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Berapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu implementasi kebijakan (X) dan partisipasi masyarakat (Y). Teori Implementasi kebijakan adalah teori George Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan teori partisipasi masyarakat adalah menurut Ericson (salam Slamet 2014:29) dimana partisipasi masyarakat ditentukan oleh tiga bentuk yaitu bentuk perencanaan, bentuk pelaksanaan dan bentuk pemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis Metode deskriptif analitis sengaja dipilih dengan maksud untuk mendapatkan gambaran nyata antara masing-masing variabel sehingga dapat menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan penyebaran angket dengan teknik analisis data menggunakan path analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, secara optimal yaitu sebesar 52%, artinya pengaruh implementasi kebijakan terhadap partisipasi masyarakat menunjukan pengaruh yang positif. Dimana nilai tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai yang terlibat mulai dari komunikasi dalam proses penyampaian informasi, sumber daya yang melaksanakan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemanfaatan hasil serta disposisi dan struktur birokrasi yang baik dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel implementasi kebijakan berpengaruh cukup signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta dan keaktifan masyarakat terhadap program-program kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program PIPPK dan Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Research on "Analysis of Policy Implementation Program for Development Innovation and Regional Empowerment (PIPPK) in order to increase community participation in Husein Sastranegara Village, Cicendo District, Bandung City" was conducted because there were several problems including the lack of public understanding of PIPPK, weak bureaucratic structure, and low society participation. The formulation of the problem in this study is How Much Influence the Implementation of Development Innovation Program Policy and Regional Empowerment (PIPPK) in order to increase community participation in Husein Sastranegara Village, Cicendo District, Bandung City. Meanwhile, the purpose of this study was to analyze how much influence the implementation of the Development Innovation Program and Regional Empowerment Policy (PIPPK) in order to increase community participation in Husein Sastranegara Village, Cicendo District, Bandung City.

This research consists of two variables, namely the policy implementation variable (X) and the community participation variable (Y). The theory used in policy implementation is the theory of George Edward III (in Agustino, 2008: 149-154) in which policy implementation is influenced by four dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Meanwhile, the theory of community participation used is according to Ericson (greeting Slamet 2014: 29) where community participation is determined by three forms, namely the form of planning, the form of implementation and the form of utilization.

The research method used is descriptive analytical method. The descriptive analytical method is deliberately chosen with the intention of getting a real picture between each variable so that it can test the effect of the independent variable (X) on the dependent variable (Y). With data collection techniques in the form of observation, interviews and questionnaires with data analysis techniques using path analysis.

The results showed that the optimal effect of the Policy Implementation for the Development Innovation Program and Regional Empowerment (PIPPK) in order to increase community participation in Husein Sastranegara Village, Cicendo District,

Bandung City, was optimally at 52%, meaning that the effect of policy implementation on community participation showed a positive effect. Where this value shows that the implementation of the policy has been carried out optimally by all employees involved starting from communication in the process of delivering information, the resources that carry out the program starting from planning, implementing activities, to utilization of results as well as dispositions and good bureaucratic structures in the division of tasks and responsible.

The conclusion based on the research results shows that the policy implementation variable has a significant effect on community participation in order to increase community participation and activity in government policy programs, in this case the Implementation of the Development Innovation Program and Regional Empowerment (PIPPK) in Husein Sastranegara Village, Cicendo District Bandung.

Keywords: Policy Implementation, PIPPK Program and Community Participation.

I. Pendahuluan

Era modernisasi ini kehidupan masyarakat mengalami berbagai perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang didasarkan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan, terutama di dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan pemerintahan daerah secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Paradigma pemberdayaan tersebut memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagaman Bangsa Indonesia dapat dikelola dengan baik secara sentralistik dalam pemerintahan.

Pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Percepatan kegiatan pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni mencapai kondisi masyarakat yang adil, makmur dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ini memandang masyarakat Indonesia sebagai subjek pembangunan yang punya inisiatif, kreasi dan jiwa untuk mandiri untuk memajukan daerahnya yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, jelas bahwa pelaksanaan pembangunan yang

diharapkan dalam era otonomi daerah merupakan proses pembangunan yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kesinambungan pembangunan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat menjadi PIPPK, dimana PIPPK ini berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis” sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023, maka untuk merealisasikan RPJMD, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan PIPPK yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bandung.

Selain itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyikapi fenomena ini sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan juga merubah pola pikir masyarakat. Upaya terpadu diharapkan

dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi masing-masing masyarakat, sehingga jangan hanya dijadikan sebagai sebuah objek pembangunan, tetapi juga harus dapat menjadi subjek dari pembangunan tersebut.

Adapun masyarakat dikatakan sebagai subyek, dimana peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memaksimalkan tujuan pembangunan itu sendiri dan dapat mengarahkan pembangunan tepat sasaran serta menjadi kunci utama dari keberhasilan pembangunan. Kerjasama dan koordinasi serta sinergitas dapat tercipta antara masyarakat dengan pemerintah secara baik, dengan melihat apakah masyarakat telah memiliki kemampuan berperan aktif dalam sebuah proses pembangunan, karena kemampuan berperan aktif merupakan hal yang sangat mendukung keberhasilan sebuah proses pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerah masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan daerah, setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan berlomba-lomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktifitas masyarakat umum serta sebagian besar berpengaruh terhadap pemberdayaan kewilayahan di suatu kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Yang mana inovasi daerah disini berarti semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung sebagai daerah otonom memiliki Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi aparat serta pemberdayaan masyarakat Kota Bandung berbasis kewilayahan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Maksud adanya PIPPK adalah untuk meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan (LKK) dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan PIPPK dapat diwujudkan melalui singergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan LKK yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan semangat desentralisasi, inovasi dan kolaborasi, berbagai program pembangunan akan diamanatkan kepada setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kota Bandung berdasarkan kebutuhan masing-masing Kelurahan atas dasar kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh masyarakat Kota Bandung.

PIPPK Kota Bandung dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui RW (Rukun Warga), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Lembaga Karang Taruna, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) serta Kelurahan dan Kecamatan. Perencanaan dilakukan oleh RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM bersama dengan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Kelurahan. Setelah disetujui, kemudian program dan kegiatan akan dikelola oleh Camat selaku Pengguna Anggaran dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Seiring kegiatan berjalan, Camat dan Lurah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota. Dimana keseluruhan proses ini akan diawasi oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal (masyarakat).

PIPPK merupakan fokus pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di Kecamatan, mengingat Kecamatan memiliki wilayah yang luas, jarak gestur politik, jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki. Pemerintah Kecamatan memiliki tiga fungsi utama, yaitu model program sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi kerakyatan dan sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat kota untuk pengambilan keputusan politik.

Program dan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan ini untuk pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang tersedia sebesar Rp 100.000.000 untuk setiap RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM se-Kota Bandung. Gambaran Umum Pagu Indikatif PIPPK diuraikan sebagai berikut :

- a Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
(jumlah RW 1.584 x Rp 100.000.000,00) = Rp 158.400.000.000,00)
- b Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
(jumlah PKK 151 x Rp 100.000.000,00) = Rp 15.100.000.000,00).
- c Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
(jumlah LPM 151 x Rp 100.000.000,00) = Rp 15.100.000.000,00)
- d Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
(jumlah Karang Taruna 151 x Rp 100.000.000,00) = Rp 15.100.000.000,00)

Sehingga total Pagu APBD Kota Bandung untuk pelaksanaan PIPPK tahun anggaran 2019 adalah Rp 203.700.000.000,00. Dimana dana ini diberikan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk dapat membangun wilayahnya masing-masing. Diharapkan dengan adanya dana stimulan ini masyarakat juga dapat memberikan sumbangsih bagi kewilayahannya berupa tenaga, materi, atau pun bentuk lainnya. Untuk itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang PIPPK ini karena dirasa ada masalah yang menjadi sorotan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang menjadi sorotan utama Peneliti adalah munculnya program pembangunan-pembangunan yang dilakukan sebagai wujud dari Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Namun apakah dengan adanya program pembangunan ini masyarakatnya semakin berdaya atau tidak mengingat masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam setiap realisasinya.

Hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, ditemukan beberapa indikator-indikator masalah yang berkaitan dengan tingkat implementasi kebijakan PIPPK yang belum optimal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia tentang PIPPK**

Contohnya dapat dilihat dari sikap apatis masyarakat terhadap program-program pembangunan dari pemerintah, seharusnya masyarakat antusias dengan adanya program PIPPK ini yaitu dengan cara ikut andil didalamnya dan ikut berpartisipasi terhadap program pembangunan

tersebut baik secara fisik (tenaga) ataupun secara materil (bantuan dana), tetapi pada kenyataannya rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan memperlihatkan sikap seolah tidak peduli terhadap program-program pemerintah. Hal tersebut diakibatkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program PIPPK. Sehingga proses pembangunan tidak terselesaikan sesuai dengan target dan harapan yang telah ditentukan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat.

2. **Masih Lemahnya Struktur Birokrasi**

Contohnya dapat dilihat pada saat pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang bertujuan untuk menentukan kegiatan pembangunan apa saja yang akan menjadi usulan masyarakat, tetapi pada kenyataannya program pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan hasil Musrenbang. Hal ini disebabkan oleh sulit terakomodirnya usulan dari masyarakat terhadap program pembangunan dikewilayahan, sehingga mengakibatkan lambatnya tingkat pembangunan dikewilayahan khususnya di tingkat ke-RWan.

3. **Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Contohnya yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan program PIPPK, proses pelaksanaan program PIPPK hingga proses pemanfaatan PIPPK. Maka yang nampak adalah sikap acuh dari masyarakat terhadap program-program inovasi pembangunan dari pemerintah yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini membuat program PIPPK belum berjalan secara optimal terhadap pembangunan dikewilayahan dan manfaatnya kurang diterima dengan baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dengan mengambil judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi pernyataan masalah (*research statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Dari pernyataan di atas, dapat diambil satu permasalahan untuk kemudian diidentifikasi kedalam penelitian ini, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung?
2. Implementasi Kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi besar pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung ?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan pemeliharaan yang berkaitan dengan Program Inovasi Pembangunan Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sejalan dengan konsep teori dan keilmuan administrasi publik sebagai bagian dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis berapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
2. Untuk menganalisa Kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi besar pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung ?

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan ganda baik secara teoritik maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritik

Khususnya bagi lingkup studi magister ilmu administrasi publik, penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sarana dalam menerapkan dan mengembangkan teori atau ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di Universitas Pasundan sehingga diharapkan dapat memperluas wawasan, pemahaman, penalaran serta pengalaman Peneliti sebagai peneliti bidang administrasi publik. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian serupa dimasa mendatang.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan, khususnya bagi aparatur pemerintah di lingkup Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat serta kepuasan pelayanan publik terhadap Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

II. Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir

Menurut Meter dan Horn, dalam AG Subarsono (2005: 99) ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut dua ahli yang bernama Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Arif Rohman, 2001: 86), ini oleh para ahli ilmu politik dikelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan '*the top down approach*'. Menurut kedua ahli ini, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka dibutuhkan banyak syarat. Syarat-syarat tersebut adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; hubungan saling ketergantungan harus kecil; adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Sedangkan teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh Goerge Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154). Dimana dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, diantaranya Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi

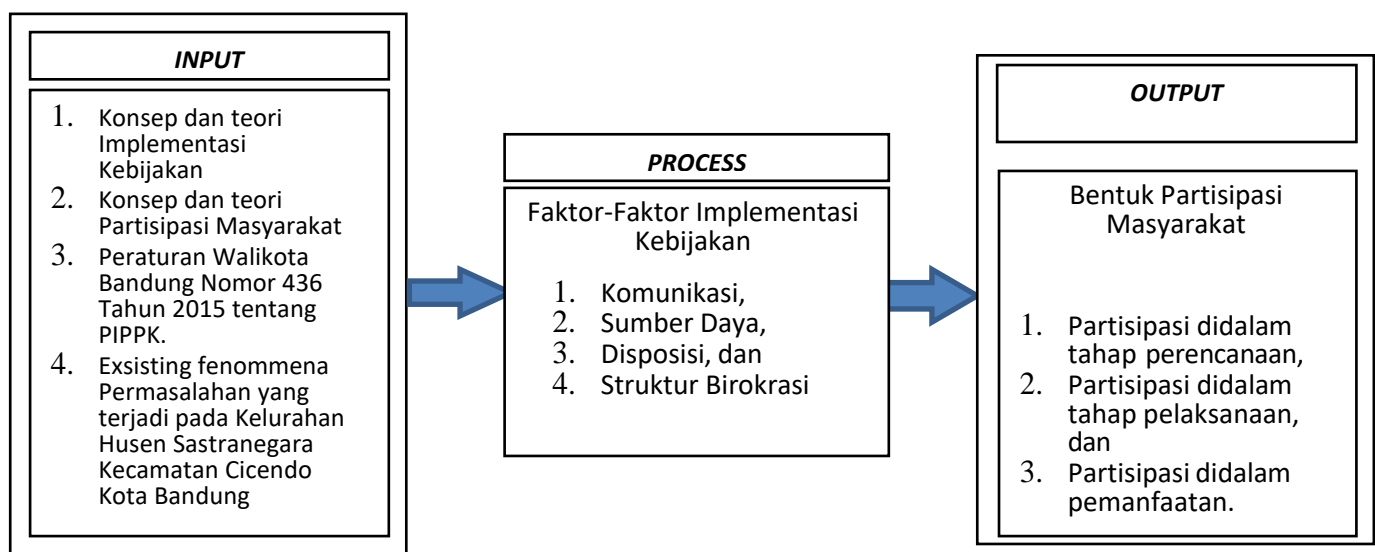
Bentuk partisipasi aktif masyarakat menggunakan teori menurut Ericson (dalam Slamet, 2014: 29) dimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*), Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*), dan Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Teori penghubung antara kebijakan publik dengan partisipasi masyarakat, adalah mengambil teori dari Hetifah Sj Sumarto (2003: 3), dimana partisipasi masyarakat diartikan sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif pada setiap kebijakan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi aparat serta pemberdayaan masyarakat Kota Bandung berbasis kewilayahan yang tertuang

dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, ditemukan beberapa indikator-indikator masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang belum optimal, diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang PIPPK, masih lemahnya struktur birokrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan PIPPK di Kelurahan Husein Sastranegara belum terlaksana secara maksimal.



Gambar 2.3
Paradigma Berpikiran tentang Implementasi Kebijakan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Sumber : Peneliti, Januari 2021.

Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitiannya adalah:

1. Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) besar pengaruhnya dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung,
2. Implementasi Kebijakan melalui faktor-faktor kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi besar pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis sengaja dipilih dengan maksud untuk mendapatkan gambaran nyata antara masing-masing variabel sehingga dapat menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Menurut Nazir (1985: 63) Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selanjutnya Nazir mengemukakan persepsi waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Pendekatan penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dimana untuk menguji hipotesis dan melakukan interpretasi yang dalam untuk mengetahui hubungan diantara faktor-faktor pada variabel bebas (X) mengenai implementasi kebijakan terhadap variabel terikat (Y) yaitu partisipasi masyarakat pada Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung secara optimal yaitu sebesar 52%, artinya pengaruh implementasi kebijakan terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan

pengaruh yang positif. Dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai yang terlibat mulai dari komunikasi dalam proses penyampaian informasi, sumber daya yang melaksanakan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemanfaatan hasil serta disposisi dan struktur birokrasi yang baik dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan program Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah dilakukan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimana dalam melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan komunikasi yang baik, sumber daya yang mencukupi, disposisi yang tepat dan struktur birokrasi yang sesuai. Adapun dimensi yang paling menonjol dari Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung ini yaitu terdapat pada dimensi struktur birokrasi, dimana pembagian tugas/fragmentasi sudah dilaksanakan dengan baik dan teknik pelaksanaan program dilapangan dilakukan sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan berpengaruh cukup signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta dan keaktifan masyarakat terhadap program- program kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

V. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, secara optimal yaitu sebesar 52%, artinya pengaruh implementasi kebijakan terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan pengaruh yang positif. Dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai yang terlibat mulai dari komunikasi dalam proses penyampaian informasi, sumber daya yang melaksanakan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemanfaatan hasil serta disposisi dan struktur birokrasi yang baik dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan berpengaruh cukup signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta dan keaktifan masyarakat terhadap program-program kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Saran Teoritis

Bagi Pengembangan Ilmu Administrasi Publik, penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung perlu dilakukan lebih lanjut. Terutama terkait dimensi-dimensi yang mempengaruhi variabel implementasi kebijakan (X) terhadap variabel partisipasi masyarakat (Y). Sehingga diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Ilmu Administrasi Publik di masa mendatang.

Saran Praktis

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, maka sebaiknya dimensi-dimensi implementasi kebijakan seperti dimensi komunikasi yang meliputi penyampaian informasi dengan baik, jelas dan konsisten, dimensi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, fasilitas serta kewenangan, dimensi disposisi yang meliputi pengangkatan birokrat serta pemberian insentif, dan dimensi struktur birokrasi yang meliputi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP dan fragmentasi sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan keahliannya masing-masing. Sehingga pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Saran Kebijakan

Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dan berkolaborasi sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan tujuan dan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan yang harus dilaksanakan baik oleh Kelurahan maupun oleh mitra kerja pemerintah yaitu LKK (LPM, Karangtaruna, PKK dan RT/RW). Sehingga Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Soejono. 2005. *Metode Penelitian Suatu Metode dan Penerapan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bintaro. 1996. *Model Partisipasi Masyarakat*. Jakarta : Grasindo.
- Buehl. 2003. *Learning by Example*. Bogor : Graha Indonesia.
- Frederickson. 1997. *The Spirit Of Publik Administration*. San Fransisco: Jossey-Bas Publisher.
- Fung, Archon. 2012. *Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Gulo W. 2002. *Metode Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Hani, Handoko. 2001. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Hamidjoyo. 1987. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Berpartisipasi*. Bandung: Fokus Media.
- Hasley, D. George. 2003. *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Heidjarachmanranupandojo dan Saud Husnan. 1990. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE.
- Jasfar. 2005. *Manajemen Jasa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Julitriarsa dan John Suprihartoro. 1998. *Manajemen Umum*. Jakarta : BPFE.
- Lovelock. 1991. *Managing Service*. Pretince Hall. Englewood Cliff. New Jersey.
- Lovelock, and Wright. 2005. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Manjta, W. 2005. *Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Malang. Wineka Media.

- Korler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta : PT. Prenhalundo.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. 1992. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastropetro. 1986. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Slamet, Y. 2014. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel, Nogi, S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Wahab. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, A. Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen :

- Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 034 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

Dokumen Penelitian Terdahulu :

Tesis, Suryani Nurmalasyiahi. 2018, tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, STIA Tabalong.

Tesis, Ahmad Mustanir. 2017, yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, STISIP Muhammadiyah Rappang.